

PENGAJIAN PROGRAM KURSUS BIDANG PARIWISATA

Melati Indri Hapsari

e-mail: melatikesling06@yahoo.co.id

Pamong Belajar PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi lembaga kursus dan pelatihan bidang pariwisata, (2) mekanisme pembelajaran bidang pariwisata pada lembaga kursus dan pelatihan, (3) program yang dapat dikembangkan dalam bidang pariwisata, (4) kondisi lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata, dan (5) mekanisme uji kompetensi pada lembaga sertifikasi. Penelitian dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bidang pariwisata di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada bulan Agustus – September 2016. Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari hasil studi pustaka dan dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi hampir semua LKP pariwisata yang mejadi sasaran penelitian dapat disebut layak. Akan tetapi, program dan strategi pembelajaran yang dikembangkan masih banyak menggunakan kurikulum lokal dan disusun sendiri oleh LKP serta belum berdasarkan SKKNI dan standar internasional.

Kata-kata kunci: pembelajaran, kursus, pelatihan, pariwisata

ASSESSMENT OF TOURISM COURSE PROGRAMS

Abstract: *The objectives of this research are to find out (1) the condition of the course institution and training in tourism sector, (2) the mechanism of learning of tourism in the institution of the course and training, (3) the programs that can be developed in the field of tourism, (4) tourism profession, and (5) competency test mechanism in the certification body. The research was conducted at the Institution of Course and Training (ICT) in the field of tourism in Central Java and Yogyakarta as from August - September 2016. This quantitative descriptive research with survey approach collected primary quantitative and qualitative data using interview and observation techniques and secondary data obtained from literature and document study. The data were analyzed quantitatively and qualitatively. The research results show that almost all ICT in tourism field targeted in this research are good enough. However, the instructional programs and strategies to develop are still mostly applying local curriculum created by the Institution itself not based on Indonesian Qualification Framework and international standard.*

Keywords: instruction, course, training, tourism

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asosiation of South East Asia Nation*) (MEA) mulai diberlakukan tahun 2016. Konsekuensi diberlakukannya kesepakatan ini, siap atau tidak perubahan tuntutan dunia usaha dan industri dikawasan ASEAN akan terjadi, aliran deras perpindahan sumber daya manusia (SDM) dari satu tempat ketempat lainnya berdasarkan hukum *supply* dan *demand*. Ribuan bahkan jutaan pekerja akan berbondong-bondong mengadu nasib di berbagai negara yang membutuhkan kehadiran mereka. Hal ini akan menuju pada terbentuknya sebuah "*labour market*" atau pasar kerja yang penuh dengan persaingan

ketat.

Terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil maka tidak bisa lepas dari sektor pendidikan. Pendidikan nonformal yang menyediakan tenaga terampil siap pakai adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). LKP di Indonesia semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak bisa lepas dari pembinaan yang terus dilaksanakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program-program yang dilaksanakan pun semakin bervariasi. Akan tetapi, ada yang perlu digarisbawahi bahwa

banyak lulusan program kursus yang belum lulus uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi (LSP), karena LKP biasanya melakukan uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi (LSK).

Kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan kepada peserta didik tentang berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap mental dengan tujuan untuk mengembangkan diri, mencari nafkah melalui bekerja atau berwirausaha, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat. Untuk itu, agar penyelenggaraan kursus dan pelatihan tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lembaga sertifikasi kompetensi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka

cabang yang berkedudukan di kota lain.

Indonesia perlu mengantisipasi dengan mengembangkan keterampilan dan keahlian terutama yang saat ini dibutuhkan di kawasan ASEAN. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperbanyak lembaga sertifikasi profesi untuk menjamin mutu lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan. Masyarakat ekonomi ASEAN menyebabkan arus barang jasa bebas keluar masuk negara-negara ASEAN. Hasil dari studi eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri terutama pasar ASEAN antara lain pariwisata, operator produksi, kayu lapis, konstruksi (PP-PAUDNI Regional II Semarang, 2016).

Oleh karena itu, pariwisata merupakan salah satu bidang keterampilan yang juga perlu dikembangkan oleh pemerintah. Di samping tingginya potensi pariwisata Indonesia yang membutuhkan banyak tenaga terampil, pariwisata juga merupakan salah satu potensi yang dimiliki negara-negara di kawasan ASEAN terutama di Negara Thailand dan Singapura. Keahlian bidang pariwisata yang dimiliki oleh putera-puteri Indonesia, selain dibutuhkan di dalam negeri juga diharapkan mampu bersaing memperebutkan pasar kerja di kawasan ASEAN. Pemenuhan tenaga terampil di bidang pariwisata salah satu dapat dipenuhi oleh pendidikan nonformal melalui program kursus dan pelatihan di bidang pariwisata. LKP pariwisata yang ada melayani kursus dan pelatihan di bidang pariwisata divisi hotel dan restoran.

Beberapa langkah negara anggota ASEAN untuk mempersiapkan diri agar dapat mengimplementasikan *Mutual Recognition Arrangement (MRA) Tourism* ini adalah (a) identifikasi kelembagaan terkait MRA sertifikasi *tourism*; (b) verifikasi standar kompetensi melalui *The ASEAN Tourism Qualifications Equivalency Matrix*; (c) pengembangan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) skema sertifikasi okupasi nasional; (d) penerapan KKNI dan okupasi nasional pada pendidikan vokasional dan pelatihan kerja; (e) pengembangan dan penerapan ruang lingkup skema sertifikasi KKNI dan KON pada LSP; (f) sertifikasi sesuai skema sertifikasi KKNI dan okupasi nasional; serta (g) registrasi kualifikasi sesuai ATPRS.

Status Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perlu dibandingkan dengan

standar kompetensi ASEAN, yakni *Asean Common Competency Standards For Tourism Professionals* (ACCSTP). Dari verifikasi beberapa LSP sektor pariwisata nampaknya Indonesia siap untuk mengimplementasikannya. Dalam hal beberapa fungsi dasar belum ada SKKNInya, maka Indonesia dapat menggunakan langsung standar ACCSTP. Dalam hal kerangka kualifikasi, ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional* (MRA) – *Handbook*, telah memberi pedoman pengembangan kualifikasi baik KKNI level I sampai VI, 32 *job titles*/Kualifikasi Okupasi. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki KKNI sesuai dengan Pepses 8/2012 level I-IX, yang di samping mengatur deskripsi setiap level KKNI, tetapi juga kesetaraan untuk pencapaian melalui sistem pendidikan dan juga pencapaian melalui pelatihan dan pengalaman di tempat kerja.

Dengan penetapan CATC (*Common ASEAN Tourism Curriculum*) pada setiap lembaga pelatihan dan pendidikan, maka pencapaian pembelajaran baik melalui pelatihan dan pendidikan atau dari tempat kerja/industri dapat tercapai. Untuk memasuki pendidikan atau pelatihan dilakukan RPL (*Recognition Prior Learning*) atau untuk masuk industri dilakukan RCC (*Recognition Current Competency*). Skema

sertifikasi kompetensi profesi KKNI berdasarkan AQRF, ACCSTP dan CATC sektor pariwisata dibagi menjadi 6 bidang yaitu bidang tata hidang (*food and beverage service*), bidang tata boga (*food production*), bidang tata graha (*housekeeping*), bidang kantor depan (*front office*), bidang operasional tur (tour operation), bidang agen perjalanan (*travel agencies*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) kondisi lembaga kursus dan pelatihan bidang pariwisata, (2) mekanisme pembelajaran bidang pariwisata pada lembaga kursus dan pelatihan, (3) Program yang dapat dikembangkan dalam bidang pariwisata, (4) kondisi lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata, (5) mekanisme uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kondisi lembaga kursus dan pelatihan bidang pariwisata, (2) untuk mengetahui mekanisme pembelajaran bidang pariwisata pada lembaga kursus dan pelatihan, (3) untuk mengetahui program yang dapat dikembangkan dalam bidang pariwisata, (4) untuk mengetahui kondisi lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata, (5) untuk mengetahui mekanisme uji kompetensi pada lembaga sertifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan metode survei. Metode ini dipakai karena masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, informasi yang ingin didapat adalah informasi yang luas tetapi tidak mendalam, ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur (Sugiyono, 2011). Jenis penelitian dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan aktifitas yang dilakukan lembaga kursus dan pelatihan bidang pariwisata dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) bidang pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan di LKP yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bidang pariwisata dan LSP yang melaksanakan uji kompetensi bidang pariwisata di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk LKP pariwisata diambil LKP di 5 kota/kabupaten di Jawa Tengah dan LKP di 2 kota/kabupaten di DIY dengan total 17 LKP yaitu (1) LKP *Cruise World Jogja Hospitality*

Institute, (2) LKP *Trans Ocean Floating Hotel Program*, (3) *KP Indocrew*, (4) LKP Duta Persada, (5) LKP Sindoro *Hotel College*, (6) LKP Perhotelan *7 Seas*, (7) LKP Wisata Bahari, (8) LKP *Mentor College Internasional Marine Hotel Training*, (9) LKP Graha Wisata, (10) LKP Bhakti Nusa Semarang, (11) LKP Magistra Utama Semarang, (12) LKP Bermuda, (13) LKP *International Ship Partner* (ISP), (14) LKP *Hospitality Industry Program College*, (15) LKP *Royal Seasons Hotel Education Center*, (16) LKP *Internasional Hotel Management School* (IHS), dan (17) LKP Adam Mulia.

Sedangkan LSP sebanyak tiga LSP yaitu (1) LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, (2) LSP Pariwisata, dan (3) LSP Pariwisata Jawa Tengah. Alasan pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah kemudahan keterjangkauan dan keterbatasan anggaran yang ada. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2016.

Data dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif dan data kualitatif yang berasal dari data primer berupa hasil wawancara pengelola LKP dan pegawai LSP, observasi serta data sekunder dan

dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan sesuai dengan data yang diperoleh yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lembaga Kursus dan Pelatihan Sektor Pariwisata

Kelembagaan

1. Kinerja lembaga

LKP yang menjadi sasaran penelitian belum semuanya dinilai kinerjanya. Dari data yang masuk sebanyak 17 LKP diketahui bahwa yang belum berkinerja sebanyak 8 LKP (47.06 %), LKP yang mempunyai kinerja A sebanyak 3 LKP (17.65 %) dan yang mempunyai kinerja B sebanyak 6 LKP (35.29 %). LKP yang telah berkinerja mempunyai kinerja yang cukup baik karena sebagian LKP bidang Pariwisata mempunyai aspek perspektif evaluasi kinerja yang sangat lengkap.

2. Struktur organisasi

Semua LKP memiliki struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Jadi antara satu LKP dengan LKP yang lain tidak sama. Struktur organisasi lembaga dilengkapi dengan beberapa aspek yaitu uraian tugas, kewajiban, hak pengurus, kewenangan. LKP yang struktur organisasinya dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing posisi di struktur organisasi sebanyak 13 LKP (76,47 %), kewajiban tiap-tiap pengurus sebanyak 10 LKP (71,43 %), hak pengurus sebanyak 8 LKP (47.06 %), dan kewenangan sebanyak 10 LKP (71.43 %).

3. Bidang kursus

Diketahui bahwa bidang - bidang kursus yang paling banyak dikembangkan oleh 17 LKP adalah Hotel *Service-Housekeeping* paling banyak dilaksanakan sebanyak 13 LKP (76.47 %), Hotel *Service-Resturant Service* sebanyak 12 LKP (70.59 %), Hotel *Service-Front Office* sebanyak 7 LKP (41.18 %) dan *Travel Service* sebanyak 2 LKP (11.77 %).

Skema sertifikasi kompetensi profesi KKN berdasarakan AQRF, ACCSTP dan CATC sektor pariwisata dibagi menjadi 6 bidang yaitu: (a) bidang tata hidang (*food and beverage service*), (b) bidang tata boga (*food production*), (c) bidang tata graha (*housekeeping*), (d) bidang kantor depan (*front office*), (e) bidang operasional tur (*tour operation*), (f) bidang agen perjalanan (*travel agencies*). Dari

data diperoleh bahwa sebagian besar LKP membuka kursus bidang *Service-Housekeeping* sebanyak 13 LKP (76.47 %). Bidang tersebut banyak dibuka karena banyak permintaan dari DUDI/user terkait dengan *service-housekeeping*. Jadi hampir semua LKP pariwisata membuka program kursus bidang tersebut.

4. Penilaian program

Penilaian program yang ingin diketahui datanya terdiri dari waktu pelaksanaan dan aspek penilaian. Waktu pelaksanaan penilaian program pada awal program sebanyak 11 LKP (64.71 %), pada saat pelaksanaan program sebanyak 16 LKP (94.12 %) dan pada akhir program 16 LKP (94.12 %).

Aspek penilaian program meliputi aspek proses pembelajaran sebanyak 17 LKP (100 %), kinerja pendidik sebanyak 14 LKP (82.35 %), kinerja tenaga kependidikan sebanyak 13 LKP (76.47 %), sarana prasarana sebanyak 10 LKP (58.82 %), biaya sebanyak 10 LKP (58.82 %), kemitraan program sebanyak 10 LKP (58.82 %), hasil belajar peserta didik sebanyak 16 LKP (94.12 %), perangkat pembelajaran sebanyak 9 LKP (52.94 %), dan tindak lanjut sebanyak 9 LKP (52.94 %).

5) Peserta didik

Aspek peserta didik yang diambil datanya adalah syarat/kriteria peserta didik, rekrutmen peserta didik, data peserta didik. Persyaratan peserta didik secara umum dari 17 LKP adalah sebagai berikut (1) SMU sederajat; (2) usia antara 18 – 33 tahun; (3) minimal tinggi badan untuk tiap LKP beraneka ragam. Rentang tinggi badan untuk laki-laki minimal antara 158 – 165 cm sedang untuk perempuan minimal antara 154 – 160 cm; (4) Fc. KTP; (5) sehat jasmani dan rohani; (6) surat ijin orang tua/wali; (7) tidak buta warna; (8) tidak bertato dan bertindik untuk laki-laki.

Rekrutmen peserta didik yang dilakukan oleh LKP dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak dilakukan adalah merekrut peserta didik secara langsung sebanyak 17 LKP (100 %). LKP-LKP tersebut mempunyai tim pemasaran sendiri untuk merekrut peserta didik agar lembaga mereka tetap banyak peserta didiknya.

Untuk proses atau langkah-langkah rekrutmen setiap LKP mempunyai strategi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa pernyataan-pernyataan di bawah ini.

Direktur utama International Hotel *Management School* (IHS), Atik Wijayanti pada tanggal 19 Agustus 2016 menjelaskan terkait dengan langkah-langkah rekrutmen peserta didik, sebagai berikut.

“Rekrutmen dilakukan dengan melakukan pemasaran, pendaftaran, wawancara, hasil tes, dialog orang tua/wali, registrasi, pembelajaran. Yang terlibat dalam rekrutmen peserta didik adalah panitia penerimaan peserta didik baru.”

Pengelola Magistra Utama, Dwi Hapsari Abdi Utami, SE pada tanggal 19 Agustus 2016 menjelaskan tentang rekrutmen sebagai berikut.

“Sebagian besar peserta didik diperoleh dengan presentasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan bonus bagi sekolah yang lulusannya masuk Magistra Utama.”

Pimpinan LPP Graha Wisata, Heni Yuliasuti, SE pada tanggal 16 Agustus 2016 menjelaskan bahwa.

“.....yang terlibat dalam rekrutmen peserta didik adalah tim marketing. Jadwal untuk kegiatan team marketing diatur oleh bagian front office. Kalau sudah ada jadwal team marketing ke sekolah untuk promosi.”

Pimpinan LKP Adam Mulia, Moch. Roesly Musthofa pada tanggal 20 Agustus 2016 menjelaskan langkah-langkah rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut.

“.....pengajuan presentasi ke sekolah/ lembaga, presentasi/sosialisasi, *pre-screening*, *briefing*. Yang terlibat: *marketing*, *front office*, pimpinan.”

Cara rekrutmen peserta didik secara langsung sebanyak 17 LKP (100 %), kerja sama dengan pemerintah desa/kecamatan/sekolah sebanyak 13 LKP (76.47 %), bekerjasama dengan DUDI sebanyak 13 LKP (76.47 %), penyebaran brosur/*leaflet*/poster/spanduk sebanyak 17 LKP (100 %).

Lembaga memiliki dokumen rekapitulasi lulusan yang meliputi data peserta didik sebanyak 16 LKP (94.12 %), data jumlah lulusan sebanyak 15 LKP (88.23 %), data lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 7 LKP (41.17 %), data lulusan yang bekerja pada DUDI sebanyak 13 LKP (76.47 %), dan data lulusan yang belum bekerja sebanyak 7 LKP (41.18 %).

Data-data berikut merupakan jumlah keseluruhan data dari 17 LKP. Data peserta didik menunjukkan kecenderungan jumlah peserta didik menurun dari tahun 2012-2013. Tahun 2012 jumlah peserta didik sebanyak 1911 orang, tahun 2013 sebanyak 1896 orang dan tahun 2014 sebanyak 1839 orang. Data jumlah lulusan menunjukkan tahun 2012 sebanyak 933 orang, tahun 2013 sebanyak 964 orang, dan tahun 2014 sebanyak 949 orang. Data lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi tahun 2012 sebanyak 108 orang, tahun 2013 sebanyak 159 orang, dan tahun 2014 sebanyak 129 orang. Data lulusan yang bekerja pada DUDI dapat diketahui tahun 2012 sebanyak 697 orang, tahun 2013 sebanyak 662 orang dan tahun 2014 sebanyak 499 orang. Sedangkan lulusan yang belum bekerja pada tahun 2012 sebanyak 70 orang, tahun 2013 sebanyak 91 orang, dan tahun 2014 sebanyak 102 orang.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh LKP terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap LKP mempunyai jenis dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Informasi yang diperoleh terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang pernah diikuti, tugas tambahan selain tugas pokoknya, prestasi dan persyaratannya

1. Tenaga Pendidik

Aspek tenaga kependidikan yang dikaji adalah kegiatan peningkatan kompetensi, tugas tambahan, prestasi, kualifikasi dan syarat/kriteria pendidik. Indikator kegiatan peningkatan kompetensi yang pernah diikuti oleh pendidik adalah (1) pengembangan kurikulum (silabus, RPP, media, bahan ajar, metode belajar, penilaian pembelajaran), (2) etika instruktur, (3) pengelolaan pembelajaran, (4) dinamika kelompok, dan (5) motivasi pembelajaran. Kegiatan peningkatan kompetensi yang pernah diikuti oleh pendidik antara lain pengembangan kurikulum sebanyak 10 LKP (58.82 %), etika instruktur sebanyak 7 LKP (41.18 %), pengelolaan pembelajaran sebanyak 10 LKP (58.82 %), dinamika kelompok sebanyak 4 LKP (23.53 %), motivasi pembelajaran sebanyak 5 LKP (29.41 %), pedagogik dan andragogik 1 (5.88 %).

Untuk pendidik kegiatan peningkatan kompetensi yang paling banyak dilakukan adalah pengembangan kurikulum sebanyak 10 LKP (58.82

%). Hal tersebut dikarenakan kurikulum program kursus bidang pariwisata perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang sehingga pendidik merasa perlu terus meningkatkan pengetahuannya untuk mengembangkan kurikulum agar tidak ketinggalan dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

Indikator tugas tambahan pendidik antara lain (a) penyusunan dan pengembangan SKL, pengembangan silabus, (b) pengembangan RPP, (c) pengembangan media/bahan ajar, (d) penyusunan instrumen penilaian, dan (e) penilaian hasil belajar. Kegiatan pendidik selain KBM sesuai data dari lapangan adalah penyusunan dan pengembangan SKL sebanyak 12 LKP (70.59 %), pengembangan silabus sebanyak 13 LKP (76.47 %), pengembangan RPP sebanyak 11 LKP (64.71 %), pengembangan media/bahan ajar sebanyak 1 LKP (5.88 %), penyusunan instrumen penilaian sebanyak 14 LKP (82.35 %), penilaian hasil belajar sebanyak 16 LKP (94.12 %), pelaporan 1 LKP (5.88 %). Pendidik yang pernah berprestasi tingkat kabupaten sebanyak 6 LKP (35.29 %), tingkat provinsi sebanyak 3 LKP (17.65 %), tingkat nasional sebanyak 3 LKP (17.65 %).

2. Tenaga kependidikan

Kegiatan peningkatan kompetensi berupa pelatihan/orientasi/*workshop* yang telah dilakukan oleh tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil data dari lapangan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan antara lain (1) manajemen kelembagaan sebanyak 13 LKP (76.47 %), (2) pengembangan kurikulum sebanyak 9 LKP (52.94 %), (3) pengelolaan anggaran sebanyak 8 LKP (47.06 %), (4) penilaian program sebanyak 8 LKP (47.06 %), (5) pengawasan program sebanyak 4 LKP (23.53 %), (6) kemitraan program sebanyak 8 LKP (47.06 %), (7) kepemimpinan sebanyak 4 LKP (23.53 %), dan (8) sertifikasi kompetensi sebanyak 8 LKP (47.06 %).

Kegiatan peningkatan kompetensi yang paling banyak dilakukan oleh tenaga kependidikan adalah manajemen kelembagaan sebanyak 13 LKP (76.47 %). Hal tersebut karena manajemen kelembagaan merupakan hal yang utama bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan lembaganya sehingga mereka akan terus melakukan *update* pengetahuan terkait hal tersebut.

Selain mengelola program, pengelola melakukan kegiatan penyusunan perencanaan

program dilakukan sebanyak 13 LKP (76.47 %), penyusunan anggaran program sebanyak 12 LKP (70.59 %), pengawasan terhadap KBM sebanyak 14 LKP (82.35 %), pengelolaan anggaran program sebanyak 12 LKP (70.59 %), penyusunan laporan program sebanyak 13 LKP (76.47 %) dan supervisi pendidik sebanyak 1 LKP (5.88 %). Prestasi pengelola yang pernah diperoleh yaitu untuk tingkat kabupaten sebanyak 4 LKP (23.53 %), tingkat provinsi sebanyak 2 LKP (11.76 %), dan tingkat nasional sebanyak 3 LKP (17.65 %).

Sarana Prasarana

Variabel sarana prasarana mencakup aspek (a) kepemilikan gedung, (b) ruangan, (c) kondisi ruang belajar, (d) kelengkapan ruang, (e) teknologi informasi yang dimanfaatkan, (f) jenis peralatan praktek. Sarana prasarana yang dimiliki oleh LKP antara lain gedung yang terdiri dari ruangan yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda (ruang sekretariat, ruang belajar teori, ruang belajar praktek, ruang baca, tempat ibadah dan kamar mandi), perabotan, alat dan bahan praktek, teknologi informasi. Gedung yang digunakan untuk LKP merupakan milik sendiri sebanyak 8 LKP (47.06 %), sewa/kontrak sebanyak 8 LKP (47.06 %), pinjam sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Ruangan yang dimiliki LKP antara lain yang memiliki ruang sekretariat sebanyak 17 LKP (100 %), ruang belajar teori sebanyak 17 LKP (100 %), bengkel kerja/ruang praktek sebanyak 17 LKP (100 %), ruang baca sebanyak 12 LKP (70.59 %), tempat ibadah sebanyak 15 LKP (88.23 %), kamar mandi sebanyak 17 LKP (100 %).

Untuk kondisi ruang belajar, LKP yang mempunyai rasio luas $\geq 2 \text{ m}^2$: 1 peserta didik sebanyak 11 LKP (64.72 %), ventilasi udara bagus sebanyak 17 LKP (100 %), pencahayaan baik sebanyak 16 LKP (94.12 %), bersih sebanyak 16 LKP (94.12 %) dan nyaman sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Dari 17 LKP, semua memiliki ruang sekretariat dengan kelengkapan ruang sekretariat terdiri dari meja, kursi, komputer semua LKP memiliki, untuk buku tamu yang memiliki sebanyak 16 LKP (94.12 %), lemari sebanyak 16 LKP (94.12 %), struktur organisasi sebanyak 14 LKP (82.35 %), papan informasi/program sebanyak 16 LKP (94.12 %), televisi sebanyak 11 LKP (64.71 %), dan koneksi internet sebanyak 16 LKP (94.12 %).

Kelengkapan ruang belajar teori yang terdiri

dari tempat duduk dimiliki hampir semua LKP beserta kursi dan meja sebanyak 16 LKP (94.12 %), papan tulis sebanyak 15 LKP (88.23 %), alat tulis sebanyak 14 LKP (82.35 %) dan alat pendukung pembelajaran sebanyak 14 LKP (82.35 %).

Dari LKP yang menjadi sasaran, yang memiliki tempat duduk di ruang prakteknya sebanyak 8 LKP (47.06 %), meja sebanyak 15 LKP (88.23 %), kursi dan papan tulis sebanyak 14 LKP (82.35 %), alat tulis sebanyak 12 LKP (70.59 %), alat pendukung pembelajaran sebanyak 13 LKP (76.47 %), alat peraga dan praktek sebanyak 16 LKP (94.12 %) dan tempat penyimpanan bahan praktek sebanyak 15 LKP (88.23%). LKP yang memanfaatkan komputer sebanyak 17 LKP (100 %), jaringan internet sebanyak 13 LKP (76.47 %), alat komunikasi sebanyak 15 LKP (88.23 %), DVD.

Pembiayaan

Variabel pembiayaan terdiri dari (a) indikator dokumen keuangan yang dimiliki, (b) alokasi biaya manajemen dan (c) alokasi biaya operasional. LKP yang memiliki laporan keuangan program dan bukti transaksi sebanyak 14 LKP (82.35 %), untuk buku kas umum semua LKP memiliki, buku kas pembantu sebanyak 7 LKP (41.18 %), dan bukti pembayaran pajak sebanyak 13 LKP (76.47 %).

Alokasi penggunaan biaya manajemen sebagai berikut: ATK penyelenggaraan dan transport penyelenggara sebanyak 15 LKP (88.23 %), identifikasi calon peserta didik sebanyak 14 LKP (82.36 %), penyusunan/pengadaan laporan sebanyak 11 LKP (64.71 %), koordinasi sebanyak 13 LKP (76.47 %), promosi sebanyak 1 LKP (5.88 %), dokumentasi sebanyak 12 LKP (70.59 %).

Biaya operasional pembelajaran diketahui bahwa alokasi yang paling besar dipergunakan untuk pengadaan alat dan bahan praktik keterampilan sebanyak 15 LKP (88.23 %), pembelian ATK peserta didik dan penilaian pembelajaran/pelatihan keterampilan sebanyak 13 LKP (76.47 %), penyusunan perangkat pembelajaran sebanyak 12 LKP (70.59 %), monitoring dan evaluasi sebanyak 10 LKP (58.82 %), pengadaan konsumsi sebanyak 6 LKP (35.29 %), dan motivasi belajar berupa dana modal usaha pasca pembelajaran sebanyak 4 LKP (23.53 %).

Program Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang dimiliki LKP untuk mendukung proses pembelajaran terdiri dari SKL, Kurikulum, Silabus, RPP, bahan ajar, media

pembelajaran dan jadwal pembelajaran. Dokumen yang paling banyak dimiliki oleh LKP adalah jadwal dan bahan ajar sebanyak 15 LKP (88.23 %). Memang tidak semua LKP memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, bahkan ada LKP yang hanya memiliki bahan ajar dan jadwal pembelajaran saja. Alasan LKP tersebut adalah yang penting peserta didik mempunyai keterampilan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

1. Perangkat pembelajaran

Dokumen program pembelajaran yang dimiliki LKP adalah SKL dan media sebanyak 13 LKP (76.47 %), jadwal dan bahan ajar sebanyak 15 LKP (88.23 %), RPP sebanyak 14 LKP (82.35 %), evaluasi pembelajaran sebanyak 1 LKP (5.88 %) dan untuk silabus semua LKP mempunyai dokumennya.

2. Kurikulum

Penyusunan kurikulum pada LKP yang menjadi acuan yaitu standar lokal yang dikembangkan sendiri sebanyak 12 LKP (70.59 %), SKKNI sebanyak 8 LKP (47.06 %), SKL dan kurikulum berbasis kompetensi sebanyak 7 LKP (41.18 %), dan standar internasional sebanyak 3 LKP (17.65 %). LKP yang mempunyai kurikulum memuat aspek keterampilan dan pengetahuan sebanyak 15 LKP (88.23 %) dan aspek sikap sebanyak 13 LKP (76.47 %).

Kurikulum yang dimiliki LKP harapannya dilakukan peninjauan secara rutin untuk meng-up date kompetensi-kompetensi yang terkini sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Aspek kurikulum yang ditinjau oleh LKP adalah SKL, SKKD dan perangkat pembelajaran sebanyak 9 LKP (52.94 %), metodologi dan jumlah jam pelajaran sebanyak 6 LKP (35.29 %). Unsur yang terlibat dalam peninjauan kurikulum hanya dua yaitu dunia usaha dan industri/asosiasi sebanyak 7 LKP (41.78 %) dan internal lembaga sebanyak 11 LKP (64.71 %).

Kursus pariwisata merupakan kursus terstruktur karena sudah mempunyai SKKNI. Bahkan secara ASEAN sudah mempunyai standar kompetensi yaitu ACCSTP. Tetapi tidak semua LKP menggunakan kurikulum yang berbasis SKKNI dan ACCSTP. LKP paling banyak menggunakan standar lokal yang dikembangkan sendiri sebanyak 12 LKP (70.59 %) untuk menyusun kurikulumnya. Padahal agar lulusannya dapat bersaing dengan tenaga kerja luar negeri harus mempunyai kompetensi sesuai dengan aturan secara internasional terutama dalam menghadapi MEA pada akhir tahun 2016 ini. Informasi tersebut didukung oleh pernyataan

dari pengelola mentor *College Internasional Marine Hotel Training*, Bapak Gigis Hartono pada tanggal 16 Agustus 2016. "RPP disusun oleh pengelola merangkap instruktur sesuai kebutuhan dunia kerja. Pengembangan kurikulum dilakukan sesuai perkembangan dunia usaha berdasarkan informasi alumni."

3. Standar kompetensi lulusan (SKL)

Ruang lingkup muatan SKL terdiri dari standar kompetensi sebanyak 12 LKP (70.59 %), kompetensi dasar sebanyak 11 LKP (64.71 %), dan indikator sebanyak 10 LKP (58.82 %). Sumber rujukan yang dipergunakan untuk penyusunan SKL antara lain direktorat pembinaan kursus dan pelatihan sebanyak 4 LKP (23.53 %), himpunan/asosiasi/DUDI sebanyak 6 LKP (35.29 %), dinas pendidikan setempat dan instansi pemerintah lainnya sebanyak 3 LKP (17.65 %), SKKNI sebanyak 7 LKP (41.17 %), referensi umum sebanyak 9 LKP (52.94 %), dan pengalaman instruktur sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Unsur yang terlibat pengembangan SKL antara lain internal lembaga sebanyak 13 LKP (76.47 %), asosiasi kursus/DUDI sebanyak 9 LKP (52.94 %), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan instansi pemerintah lainnya sebanyak 3 LKP (17.65 %) dan perguruan tinggi sebanyak 2 LKP (11.76 %).

4. Silabus

LKP dalam menyusun silabus memuat beberapa komponen yaitu materi sebanyak 14 LKP (82.35 %), standar kompetensi, kompetensi dasar dan indicator sebanyak 13 LKP (76.47 %), alokasi waktu sebanyak 11 LKP (64.71 %), sumber belajar sebanyak 10 LKP (58.82 %), pengalaman belajar sebanyak 9 LKP (52.94 %), metode belajar dan penilaian sebanyak 7 LKP (41.18 %), dan media belajar sebanyak 6 LKP (35.29 %).

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan silabus antara lain instruktur kursus dan pengelola sebanyak 12 LKP (70.59 %), asosiasi kursus/DUDI sebanyak 4 LKP (23.53 %) dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebanyak 1 LKP (5.88 %). Pengembangan silabus yang dilakukan oleh LKP harus memperhatikan beberapa hal. Hal tersebut antara lain kebutuhan DUDI sebanyak 13 LKP (76.47 %), kebutuhan belajar peserta didik sebanyak 5 LKP (29.41 %), dan kebutuhan potensi wilayah sebanyak 4 LKP (23.53 %).

5. RPP

Komponen RPP yang disusun oleh LKP, sebagai berikut indikator dan materi sebanyak

13 LKP (76.47 %), alokasi waktu dan proses pembelajaran sebanyak 12 LKP (70.59 %), standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, metode, penilaian dan sumber belajar sebanyak 11 LKP (64.70 %), serta alat dan bahan sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Pihak yang terlibat sebagai pengembang RPP antara lain instruktur sebanyak 14 LKP (82.35 %), pengelola sebanyak 13 LKP (76.47 %), asosiasi kursus/DUDI sebanyak 5 LKP (29.41 %).

Proses penyusunan RPP mempunyai langkah-langkah yang berbeda di tiap LKP. Kondisi tersebut sesuai pernyataan dari Direktur utama International Hotel *Management School* (IHS), Atik Wijayanti pada tanggal 19 Agustus 2016 menjelaskan proses penyusunan RPP (a) tenaga pendidik menerima silabus materi yang akan diajarkan beserta deskripsi alokasi waktu dan jumlah pertemuan, model dan metode pembelajaran, mekanisme evaluasi pembelajaran; (b) tenaga pendidik menyusun distribusi materi di dalam silabus sesuai dengan alokasi waktu dan jumlah pertemuan yang tersedia; (c) tenaga pendidik melengkapi distribusi materi dengan informasi mengenai model dan metode pembelajaran serta tahap-tahap pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas; (d) tenaga pendidik menambahkan informasi mengenai sumber belajar dan media pembelajaran tambahan yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran; (e) tenaga pendidik mencantumkan model evaluasi periodic yang akan dilaksanakan beserta model borang evaluasi pembelajaran yang akan digunakan.

6. Jadwal pembelajaran

Komponen yang termuat dalam jadwal pembelajaran adalah waktu pembelajaran sebanyak 16 LKP (94.12 %), materi pembelajaran dan jadwal ujian sebanyak 11 LKP (64.70 %), jadwal evaluasi akhir sebanyak 8 LKP (47.06 %), jadwal evaluasi awal sebanyak 7 LKP (41.18 %), narasumber dan kelompok kelas sebanyak 1 LKP (5.88 %). Penyusunan jadwal pembelajaran dilakukan oleh internal lembaga sebanyak 16 LKP (94.12 %) dan kesepakatan peserta didik sebanyak 3 LKP (17.67 %).

Untuk jadwal pembelajaran juga mempunyai bentuk yang beraneka ragam tetapi sebagian besar hanya memuat waktu pembelajaran sebanyak 16 LKP (94.12 %). Langkah penyusunan jadwal pembelajaran juga tidak sama antar LKP, mereka mempunyai cara dan kebiasaan masing-masing,

seperti pernyataan responden di bawah ini.

Pengelola *Royal Seasons Hotel Education Center*, Ibu Yunieta RHK Kotta tanggal 20 Agustus 2016: "Pengelola dan Tim Edukasi rapat untuk menentukan jadwal pembelajaran di tahun tersebut atau tiap tahunnya."

Direktur utama *International Hotel Management School* (IHS), Atik Wijayanti tanggal 19 Agustus 2016 menjelaskan proses penyusunan jadwal pembelajaran: "Dimulai dengan rapat tenaga pendidik dan kependidikan, rekapitulasi jumlah sesi pembelajaran dan alokasi waktu sesuai kalender akademik, plotting tenaga kependidikan, penyusunan jadwal pembelajaran, sosialisasi"

7. Strategi pembelajaran

LKP yang melakukan strategi pembelajaran teori dan praktik seluruh LKP (100 %) sedangkan untuk program magang hanya 15 LKP (88.23 %). Strategi pembelajaran di tiap LKP hampir sama tetapi pada proses pembelajarannya memang setiap LKP ada ciri khusus agar kompetensi yang menjadi target hasil pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dengan teori/tatap muka, praktek dan magang. Misal pernyataan dari Pengelola LKP *Indocrew*, Heru Subagyo pada tanggal 15 Agustus 2016 menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran di bawah ini.

"..... teori diberikan dalam bentuk bahan ajar sedangkan praktek dengan visualisasi gambar dan wawancara dengan instruktur. Praktik sesungguhnya ada di tempat magang."

Memang ada penekanan-penekanan pada kompetensi dasar tertentu yang menjadi kunci keberhasilan ketika lulusan melakukan *interview* dengan pihak user. Misalnya pernyataan dari pengelola *Mentor College Internasional Marine Hotel Training*, Bapak Gigis Hartono pada tanggal 16 Agustus 2016: "Peserta didik difokuskan menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis karena bahasa sebagai kunci sukses bekerja di bidang ini. Selanjutnya diberikan materi sesuai dunia kerjanya yaitu *waitres* dan *FB service*. 5 bulan teori dan praktek, 6 bulan on job training."

Untuk langkah-langkah pembelajaran dapat diberikan contoh dari pernyataan instruktur di LKP *International Hotel Management School* (IHS), yang menjelaskan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: (a) pra pembelajaran: membuka kelas, melakukan review mengenai materi yang telah dipelajari atau memberikan pengantar

untuk memperkenalkan materi baru; (b) kegiatan pembelajaran: ceramah, diskusi, praktek dan demonstrasi, latihan-latihan; (c) kegiatan pasca pembelajaran: evaluasi dan pengendapan.

8. Penilaian hasil belajar

Penilaian hasil pembelajaran ada dokumen yang mendukung untuk pelaksanaan penilaian hasil belajar antara lain (a) panduan penilaian, (b) instrumen penilaian, (c) data rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran, (d) laporan hasil penilaian pembelajaran. Dokumen yang dimiliki LKP terkait dengan penilaian hasil belajar antara lain instrumen penilaian dan data rekapitulasi hasil penilaian sebanyak 14 (82.35 %), laporan hasil penilaian sebanyak 13 LKP (76.47 %), dan panduan penilaian sebanyak 11 LKP (64.70 %). Waktu penilaian pembelajaran dilakukan pada proses dan akhir pembelajaran sebanyak 13 LKP (76.47 %) serta awal pembelajaran sebanyak 6 LKP (35.29 %).

Kompetensi yang dinilai pada saat penilaian hasil pembelajaran adalah pengetahuan dan keterampilan sebanyak 13 LKP (76.47 %) serta sikap/karakter sebanyak 9 LKP (52.94 %). Bentuk penilaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh LKP adalah unjuk kerja sebanyak 13 LKP (76.47 %), ujian tertulis sebanyak 12 LKP (70.58%), ujian lisan dan penugasan 11 LKP (64.70%).

Acuan-acuan yang digunakan oleh LKP dalam menyusun instrumen penilaian pembelajaran antara lain materi/bahan ajar sebanyak 10 LKP (58.82 %), indikator sebanyak 9 LKP (52.94 %), standar kompetensi dan kompetensi dasar sebanyak 8 LKP (47.06 %), serta ide instruktur sebanyak 1 LKP (2.88 %). Penyusun panduan dan alat penilaian adalah instruktur sebanyak 13 LKP (76.47 %), pengelola LKP sebanyak 10 LKP (58.82 %) dan DUDI/asosiasi sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Dokumen yang paling banyak dimiliki LKP adalah instrumen penilaian dan data rekapitulasi hasil penilaian sebanyak 14 (82.35 %). Hal tersebut didukung dari pernyataan instruktur *Mentor College Internasional Marine Hotel Training*, Ibu Agustin: "Ada panduan penilaian tetapi tidak mutlak *Mentor College Internasional Marine Hotel Training* digunakan.....".

9) Kualitas/Kompetensi Lulusan

Peserta didik kursus dinyatakan lulus dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. Sertifikat kelulusan dikeluarkan oleh banyak lembaga. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat kelulusan bagi peserta didik LKP, antara lain lembaga sendiri

sebanyak 12 LKP (70.59 %), lembaga dengan legalisir dinas pendidikan kabupaten/kota sebanyak 4 LKP (23.53 %), LSP sebanyak 3 LKP (17.65 %), LSK dan DUDI/user sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Dasar pemberian sertifikat bagi yang lulus adalah telah lulus ujian lembaga sebanyak 13 LKP (76.47 %), telah menyelesaikan kursus/pelatihan sebanyak 10 LKP (58.82 %), telah lulus uji kompetensi sebanyak 3 LKP (17.64 %), dan telah lulus magang sebanyak 2 LKP (11.77 %). Syarat peserta didik dinyatakan lulus adalah memenuhi standar minimal kelulusan sebanyak 15 LKP (88.23 %), kehadiran minimal 80 % sebanyak 11 LKP (64.70 %) dan administrasi telah lengkap sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan responden terkait persyaratan kelulusan peserta didik.

Instruktur LKP Indocrew, Ibu Melisa pada tanggal 15 Agustus 2016: “.....ujian akhir dilaksanakan (harus ketemu) dengan direktur. Direktur berdasarkan wawancara lisan dan tertulis. Sertifikasi tidak diberikan nilai materi dibelakangnya. Hanya menyatakan lulus atau tidak.”

Pengelola LKP *International Hotel Management School* (IHS), Atik Wijayanti pada tanggal 19 Agustus 2016: “Peserta didik dinyatakan lulus apabila mampu memperlihatkan unjuk kerja sesuai dengan standar industri berskala internasional, misalnya standar kerja di kapal pesiar atau hotel internasional.”

Uji Kompetensi

Peserta didik tidak semua melakukan uji kompetensi. Hanya beberapa LKP yang melakukan uji kompetensi di luar lembaga kursus. Lembaga uji kompetensi yang bekerjasama dengan LKP untuk melakukan uji kompetensi terhadap lulusan antara lain LSP sebanyak 4 LKP (23.53 %), LSK sebanyak 2 LKP (11.76 %) dan DUDI/user sebanyak 1 LKP (5.88 %). Uji kompetensi ternyata tidak semua dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi yang ada. Hanya sebanyak 4 LKP (23.53 %) yang bekerjasama dengan LSP dan 2 LKP (11.76 %) yang bekerjasama dengan LSK untuk melakukan uji kompetensi. Hal tersebut dilakukan karena ternyata tanpa uji kompetensi lulusan bisa bekerja apabila menurut user kompetensinya telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai pernyataan dari beberapa responden di bawah ini.

Pengelola LKP *Cruise World Hospitality Institute*, Singgih Wahyudi pada tanggal 15 Agustus

2016: “..... uji kompetensi dilakukan hanya untuk kapal eropa.”

Pengelola Royal Seasons Hotel Education Center: “.....peserta didik tidak diwajibkan mengikuti uji kompetensi di LSP/LSK.”

Untuk langkah-langkah uji kompetensi setiap LKP bervariasi. Di bawah ini merupakan contoh langkah-langkah yang dilakukan salah satu LKP. Pengelola LKP *International Hotel Management School* (IHS), Atik Wijayanti pada tanggal 19 Agustus 2016: “....langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik dalam mengikuti uji kompetensi adalah sebagai berikut menyelesaikan praktek kerja industri-proses pemberkasan-tahap persiapan uji kompetensi (dilaksanakan internal)-pelaksanaan uji kompetensi-sertifikat kompetensi.”

Pelayanan Pasca Lulusan

LKP melakukan pelayanan pasca lulusan dalam bentuk informasi lowongan kerja sebanyak 16 LKP (94.12 %), penyaluran sebanyak 14 LKP (82.35 %) dan pembekalan sebanyak 11 LKP (64.72 %). Pelayanan pasca lulusan merupakan poin penting keberhasilan LKP yang jenis programnya vokasi karena di dalam pelayanan pasca lulusan seharusnya ada program garansi bisa tersalurkan ke dunia kerja dan industri. Penyaluran lulusan belum menjadi program prioritas pada layanan pasca lulusan.

Penyaluran Lulusan

Cara penyaluran lulusan melalui *agency*/PPTKIS sebanyak 13 LKP (76.47 %), *direct user* sebanyak 11 LKP (64.71 %), promosi via internet sebanyak 1 LKP (5.88 %). Penyaluran lulusan menjadi daya tarik tersendiri dari LKP. Dengan adanya jaminan penyaluran kerja akan semakin banyak peserta didik yang mendaftar. Hasil dari penelitian diketahui cara penyaluran terbanyak melalui *agency*/PPTKIS yaitu 13 LKP (76.47 %). Hal tersebut sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa penyaluran tenaga kerja terutama ke luar negeri harus melalui *agency*/PPTKIS yang terdapat resmi karena lulusan dari LKP pariwisata ini sebagai besar berharap bisa bekerja di luar negeri agar mendapatkan gaji yang besar, misalnya di kapal pesiar, hotel dan restoran ternama di luar negeri.

Langkah-langkah penyaluran kerja tiap LKP beraneka ragam dan mempunyai strategi yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman tiap LKP. Salah satu cara penyaluran dapat dilihat dari pernyataan pengelola Mentor *College Internasional*

Marine Hotel Training, Bapak Gigis Hartono 16 Agustus 2016, sebagai berikut: “.....alumni diberikan informasi lowongan kerja untuk mendaftar, seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh user.”

Kemitraan/Kerja Sama

Strategi kemitraan yang dilakukan oleh LKP sebagai berikut, menjalin hubungan dengan *agency/* PPTKIS sebanyak 15 LKP (88.23 %), promosi kualitas lulusan sebanyak 13 LKP (76.47 %), menjalin hubungan dengan *user* sebanyak 12 LKP (70.59 %), menjalin mitra dengan alumni sebanyak 11 LKP (64.72 %), dan kerjasama magang sebanyak 1 LKP (5.88 %).

Jenis-jenis kerja sama yang dilakukan oleh LKP sangat beraneka ragam mulai dari kerja sama pada saat rekrutmen, proses pembelajaran (magang) sampai dengan penyaluran kerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pengelola LKP Bermuda, Sumantri pada tanggal 16 Agustus 2016 yang menjelaskan sebagai berikut: “....kerjasama dilakukan untuk keperluan magang, penyaluran kerja dan dukungan SDM.”

Strategi yang dilakukan untuk menjalin kemitraan juga sangat beraneka ragam antara lain promosi kualitas lulusan, menjalin *agency/* PPTKIS, menjalin mitra dengan alumni dan menjalin hubungan dengan *user*. Dari strategi tersebut yang paling banyak dilakukan adalah menjalin hubungan dengan *agency/*PPTKIS sebanyak 15 LKP (88.23 %).

Kondisi dan mekanisme uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata Kelembagaan

1) Struktur

Identifikasi telah dilaksanakan terhadap tiga LSP, di antaranya LSP Pariwisata Cabang DIY Komplek Bulaksumur UGM Jl. Podocarpus II Blok C-9 Yogyakarta, LSP Pariwisata Wiyata Nusantara Jl Kusumanegra 121 Komplek Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan LSP Pariwisata Gunadarma Utama Jl. Bendan Ngisor Sampangan Kota Semarang.

Sesuai dengan aturan BNSP, struktur organisasi LSP minimal terdiri dari dua unsur yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Pengarah terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota berasal dari asosiasi profesi atau asosiasi industri. Unsur pelaksana terdiri dari ketua, bagian administrasi, bidang standarisasi, bidang

manajemen mutu dan bidang manajemen mutu. Ketiga lembaga tersebut telah memenuhi syarat minimal pengurus yang ditetapkan BNSP.

Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh dari Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti,MM.

“Struktur LSP di sini sudah kami sesuaikan dengan aturan yang ada di pusat. Kalau pun ada tambahan bagian atau unsur memang menyesuaikan kondisi DIY. Akan tetapi, struktur minimal telah kami penuhi. Bahkan setahu saya semua LSP baik bidang pariwisata ataupun bukan bidang pariwisata strukturnya minimalnya sama, di mana ada unsur pengarah dan unsur pelaksana”.

2) Uraian tugas masing-masing

Dilihat dari uraian tugas struktur organisasi yang ada di LSP Wiyata Nusantara memiliki uraian tugas lebih rinci dibandingkan dua LSP yang lain. Sedangkan LSP Pariwisata Cabang Yogyakarta hanya menjelaskan uraian tugas secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut Direktur LSP Gunadharma Utama Semarang Vera Damayanti, S.E., S.Pd., M.Pd. mengatakan.

“Uraian tugas pengurus di tiap LSP pada hakikatnya sama jika ada perbedaan sedikit hal itu karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta lingkup kerja LSP yang bersangkutan. Karena pada hakikatnya, tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing personil dalam setiap organisasi hampir sama, hanya mungkin ada beberapa penajaman-penajaman untuk personil-personil tertentu”.

3) Bidang kursus sektor pariwisata yang diujikan

Berdasarkan wawancara terhadap pimpinan LSP pada tanggal 15 Agustus 2016 dapat diketahui bahwa bidang kursus sektor pariwisata yang diujikan LSP Pariwisata Cabang DIY sebanyak 12 bidang, LSP Pariwisata Gunadharma Utama 10 bidang dan LSP Pariwisata Wiyata Nusantara sebanyak 8 bidang. Berkaitan dengan hal ini Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti,MM. mengatakan.

“Bidang yang diujikan pada tiap LSP Pariwisata tidak sama jumlah dan bidangnya. Semua disesuaikan dengan sumber daya manusia atau penguji yang ada di tiap LSP. Selain itu, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki LSP juga akan sangat menentukan bidang apa saja yang bisa diujikan di LSP tersebut.”; (4) Peserta Uji Kompetensi, pada persyaratan uji kompetensi LSP Pariwisata Wiyata

Nusantara membedakan antar calon peserta masing-masing bidang, sedangkan LSP Pariwisata Gunadarma Utama dan LSP Pariwisata Cabang DIY menyamakan persyaratan bagi semua bidang uji kompetensi.

Persyaratan tersebut antara lain Foto Copy Ijazah Terakhir, Foto Copy KTP, Foto berwarna ukuran 3 x 4 (3 lembar), *Job Desk & Standart Operating Procedure* (SOP) dan Surat Referensi dari Instansi/Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti, MM. mengatakan.

“Di LSP Pariwisata Wiyata Nusantara persyaratan peserta uji kompetensi memang kami bedakan untuk masing-masing bidang. Hal ini kami lakukan untuk menspesialiskan sesuai dengan bidang/keterampilan yang akan diujikan. Untuk LSP lain mungkin tidak membedakan persyaratan uji kompetensi untuk tiap-tiap bidang”.

Jumlah peserta uji kompetensi LSP Pariwisata Cabang DIY sampai dengan wawancara dilakukan sebanyak 5.931 orang, LSP Pariwisata Gunadarma Utama sebanyak 480 orang jumlah peserta lulus 444 orang. Sedangkan LSP Pariwisata Wiyata Nusantara jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 2.681 orang dan peserta lulus sebanyak 2.675 orang.

Sumber daya manusia

(1) Tenaga Penguji, dari jumlah penguji LSP Pariwisata Gunadarma Utama memiliki penguji paling banyak di antara ketiga LSP dengan jumlah 35 orang. Sedangkan dua LSP yang lain memiliki penguji sebanyak 27 orang. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan LSP Pariwisata Gunadarma didapatkan informasi, bahwa salah satu kriteria penguji memiliki pendidikan minimal D1 dan sederajat dengan pengalaman kerja yang terkait dengan profesi selama dua tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada dua orang penguji di LSP Pariwisata Gunadarma hanya berpendidikan SMA.

Sedangkan dua LSP lain tidak mencantumkan kriteria pendidikan formal minimal. Persyaratan atau kriteria penguji selain pendidikan formal minimal, di antara ke tiga LSP tersebut relatif sama: (2) Tenaga Administrasi, tenaga administrasi LSP Pariwisata Gunadarma Utama dan LSP Pariwisata cabang DIY terdiri dari masing-masing 2 orang. Kedua LSP tersebut mempersyaratkan minimal memiliki pendidikan D3 atau sederajat bagi tenaga administrasi. Sedangkan tenaga administrasi pada

LSP Pariwisata Wiyata Nusantara sejumlah tiga orang dengan kriteria penguasaan administrasi dan komputer bagi tenaga administrasinya. Salah seorang staf administrasi LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Prima Puspita Dewi mengatakan.

“Di LSP Pariwisata Wiyata Nusantara Yogyakarta, memang staf administrasi tidak harus berpendidikan sarjana atau Diploma. Di sini cukup berpendidikan minimal SLTA. Saya sendiri hanya lulusan SMK, akan tetapi saya memiliki sertifikat komputer untuk administrasi perkantoran. Dua staf administrasi selain saya kebetulan memang sarjana”
Sarana prasarana

Sarana dan prasarana LSP Pariwisata Wiyata Nusantara terdapat di beberapa tempat sesuai dengan bidang uji kompetensi masing-masing. Seperti di Hotel Ina Garuda, Hotel Comfort, Hotel Istana Permata, Hotel Puri Asih dan STP AMPTA Yogyakarta dan lain-lain. Sedangkan LSP Pariwisata Cabang DIY membedakan prasarana pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan tempat uji kompetensi yaitu TUK di tempat kerja, TUK sewaktu uji kompetensi, TUK Mandiri. Sarana pelaksanaan uji kompetensi LSP Pariwisata cabang DIY menyesuaikan dengan TUK.

LSP Pariwisata Gunadarma Utama memiliki sarana dan prasarana yang terintegrasi di lokasi lembaga tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti, MM. mengatakan.

“Untuk sarana dan prasarana uji kompetensi, berada di tempat uji kompetensi masing-masing bidang. Kebetulan LSP Pariwisata Wiyata Nusantara Yogyakarta memiliki delapan tempat uji kompetensi. Jadi, semua sarana dan prasarana berada di delapan tempat tersebut sesuai bidang yang diujikan di sana. Kalau di kantor LSP adanya hanya ruang administrasi serta dokumen-dokumen LSP”

Pembiayaan uji kompetensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan LSP Pariwisata Wiyata Nusantara diketahui bahwa biaya uji kompetensi sebesar Rp. 830.000,00., dengan rincian biaya mandiri Rp. 500.000,00 dan bantuan stimulan sebesar Rp. 330.000,00 dari BNSP sedangkan data yang diperoleh dari LSP Pariwisata Gunadarma Utama, pembiayaan uji kompetensi dihitung secara global sebesar Rp 7.363.000,00. Dengan penambahan sebesar Rp. 813.000,00 per orang. Dengan komponen yang dibiayai antara lain paket *meeting*

full day, MUK, SKKNI, ATK + *name tag*, spanduk, asesor, transport, administrasi, distribusi sertifikat, pelaporan dan dokumentasi.

Untuk LSP Pariwisata Cabang DIY tidak didapatkan informasi tentang biaya. Berkaitan dengan hal ini, Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti, MM. mengatakan.

“Biaya uji kompetensi masing-masing bidang di sini rata-rata sebesar Rp. 830.000,00. Biaya sebesar itu apabila ada stimulan dari pusat peserta cukup membayar Rp. 500.000,00. karena yang Rp. 350.000,00. disubsidi dari pemerintah. Akan tetapi, subsidi itu tidak pasti ada, karena turun hanya pada periode atau bulan-bulan tertentu. Jika tidak ada, stimulan peserta harus membayar sendiri sebesar Rp. 830.000,00.”

Prosedur uji kompetensi

Pada prosedur uji kompetensi LSP Pariwisata Wiyata Nusantara membagi menjadi tiga tahapan yaitu (1) proses awal assesmen, (2) proses pra assesmen, dan (3) proses assesmen (uji kompetensi). Proses awal assesmen langkah prosedur terdiri dari memberikan informasi permohonan sertifikasi, proses pendaftaran dan pengambilan keputusan. Pada proses pra assesmen terdiri dari langkah prosedur menjelaskan tata cara kepada peserta, konfirmasi unit kompetensi dari SKKNI yang diasess dan melakukan penilaian mandiri. Pada proses assesmen atau uji kompetensi terdiri dari langkah prosedur peserta telah melalui proses pra assesmen, penilaian peserta melalui lisan/tulis/observasi/praktik sesuai kebutuhan, pengumpulan bukti hasil uji kompetensi, diskusi hasil uji kompetensi dan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

Prosedur uji kompetensi pada LSP Pariwisata Cabang DIY tersajikan dalam bentuk diagram alur penyampaian informasi umum uji kompetensi, pra penilaian uji kompetensi, keputusan uji kompetensi, pemberitahuan dan pencacatan.

Sedangkan berkaitan dengan prosedur, pimpinan LSP Pariwisata Gunadharma Utama mengatakan. “Untuk mengikuti uji kompetensi peserta datang ke LSP untuk mengisi permohonan assesmen dan mengisi assesmen mandiri serta membawa persyaratan yang telah ditentukan (Foto Copy ijazah dan KTP, Foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar, Surat Referensi dari Institusi/Perusahaan,

SOP dan *Job Description*, Sertifikat pelatihan SDM) ke LSP sebelum hari pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pada saat hari pelaksanaan Uji Kompetensi, peserta memakai pakaian kerja masing masing dan sudah membawa buku MUK dan persyaratan untuk diujikan kepada asesor. Asesor akan menguji peserta sesuai dengan bidangnya. Peserta akan diuji dalam tiga ujian yaitu ujian praktik, tertulis dan wawancara. Setelah ujian selesai, peserta akan menunggu hasil dari rapat pleno yang dilaksanakan oleh LSP dengan Asesor Kompetensi kurang lebih selama 2 bulan. Setelah pleno selesai, sertifikat akan dicetak dan didistribusikan kepada pemegang sertifikat.”

Kualitas lulusan

Secara umum, kualitas lulusan bisa dinilai sesuai kebutuhan pengguna lulusan dan bisa bersaing dengan lulusan dari negara lain karena LSP menguji peserta sesuai dengan SKKNI yang telah diberikan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari hotel tempat para peserta bekerja. Berkaitan dengan hal ini Direktur LSP Pariwisata Cabang DIY, Hairullah Gazali mengatakan.

“Peserta uji kompetensi yang lulus dari LSP Pariwisata Cabang DIY di atas 90 % diterima di tempat kerja sesuai bidang masing-masing. Bahkan telah bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN karena LSP Pariwisata Cabang DIY menguji peserta sesuai dengan SKKNI yang telah ditetapkan.”

Kemitraan/kerja sama

Dari segi kemitraan LSP Pariwisata Wiyata Nusantara memiliki mitra paling banyak yang terdiri dari unsur Birokrasi/pemerintah, asosiasi, perguruan tinggi. LSP Pariwisata Wiyata Nusantara memiliki 15 mitra, LSP Pariwisata cabang DIY memiliki 6 mitra sedangkan LSP Pariwisata Gunadharma Utama tidak menyebutkan mitra.

Berkaitan dengan kemitraan/kerja sama Direktur LSP Pariwisata Wiyata Nusantara, Dra. Hj. Suharti, MM. mengatakan: “LSP Pariwisata Wiyata Nusantara membangun kerja sama dengan berbagai organisasi pemerintah maupun swasta yang jumlahnya mencapai 15 lembaga. Harapan kami lembaga-lembaga tersebut memberikan kemudahan proses uji kompetensi dan meningkatkan kualitas peserta yang lulus pada proses uji kompetensi.”

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pengkajian ini adalah (1) kondisi LKP pariwisata yang menjadi sasaran penelitian hampir semuanya bisa disebut layak karena semua komponen dalam penyelenggaraan program dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing LKP; (2) program dan strategi pembelajaran yang dikembangkan masih banyak menggunakan kurikulum lokal yang disusun sendiri oleh LKP belum berdasarkan SKKNI dan standar internasional; (3) hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar LKP membuka kursus bidang *Service-Housekeeping* sebanyak 13 LKP (76.47%). Bidang tersebut banyak dibuka karena banyak permintaan dari DUDI/user terkait dengan *service-housekeeping*; (4) Dari ketiga LSP tersebut terdapat kesamaan bahwa ketiga LSP tersebut berafiliasi pada perguruan tinggi. LSP Gunadharma Utama berada di bawah STIEPARI Semarang. LSP Wiyata Nusantara Yogyakarta berada di bawah Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan LSP Cabang DIY berada di bawah Universitas Gajah Mada Yogyakarta; (5) Proses uji kompetensi di ketiga LSP berjalan sesuai dengan aturan dari BNSP apabila ada tambahan proses tidak mengurangi substansinya. Hasil lulusan yang mengikuti ujian di LSP sebanyak 90 % diterima bekerja.

Saran

Bagi LKP: (1) LKP ada kesempatan membuka kursus bidang lain selain *service housekeeping* karena pasar terbuka luas dalam era MEA; (2) proses pembelajaran yang sudah baik hendaknya dilengkapi dengan dokumen perangkat pendukung pembelajaran yang lebih lengkap; (3) LKP perlu memikirkan pentingnya melakukan uji kompetensi bagi peserta didik di lembaga sertifikasi yang ada agar lulusannya dapat lebih bersaing dengan tenaga kerja luar negeri lainnya.

Bagi LSP, hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki sertifikat kompetensi agar semakin banyak orang yang berkeinginan untuk melakukan uji kompetensi.

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1) perlu ada program bimbingan kepada LKP terkait dengan kelengkapan dokumen pembelajaran agar akuntabilitas LKP semakin meningkat; (2) perlu ada sinkronisasi tentang program pembelajaran kursus bidang pariwisata dan penyaluran kerja dengan pihak-pihak yang terkait antara lain BNSP, BP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja; (3) perlu ada pengembangan model penyelenggaraan dan pembelajaran yang inovatif agar lulusan LKP pariwisata dapat bersaing dalam era MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- BNSP. (2014). Review kesiapan dan rencana aksi nasional percepatan sertifikasi bidang pariwisata menghadapi ASEAN-EC. *Majalah Sertifikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: BNSP.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Pedoman pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Dirjen PNFI.
- Moleong. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
- PP-PAUDNI Regional II. Semarang. Tahun 2016
- Riyanto, Y. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo H. B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.